

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PENGELOLAAN TRAYEK UNTUK MENDUKUNG MOBILITAS MASYARAKAT DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

Renita Natasya Tanggahma

32.1119

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : 32.1119@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs Andi Masrich, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Fakfak Regency in West Papua Province faces persistent challenges in its public transportation system, including inefficiency, limited public access to services, and regional disparities. These issues hinder community mobility and highlight gaps in the effectiveness of the public service retribution policy in route management. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the public service retribution policy in managing transportation routes in Fakfak Regency and to identify the inhibiting and supporting factors that affect its execution. **Method:** The research employs a qualitative descriptive approach using George C. Edwards III's policy implementation model, which includes four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were gathered through interviews, observation, and document analysis. **Results:** The findings reveal that the implementation process faces several barriers, including limited human resources, inadequate transportation infrastructure, and a lack of effective public outreach. However, positive elements such as the local government's commitment and improvements in route governance provide critical support for the policy's implementation. **Conclusion:** To improve the effectiveness of public service retribution policy in Fakfak, stronger coordination among institutions, enhanced transportation infrastructure, and more adaptive regulatory frameworks are required. These findings can inform local governments in developing inclusive and sustainable transportation policies.

Keywords: Policy Implementation, Public Service Retribution, Public Transport Routes, Community Mobility.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat menghadapi permasalahan dalam pengelolaan transportasi umum, khususnya terkait efisiensi sistem trayek angkutan yang berdampak pada terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik dan terjadinya kesenjangan antarwilayah. Kebijakan retribusi jasa umum yang diterapkan belum mampu secara optimal mendukung mobilitas masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pengelolaan trayek angkutan umum di Kabupaten Fakfak, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. **Metode:** Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (birokrat),

kurangnya infrastruktur pendukung, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah dan adanya upaya perbaikan tata kelola trayek. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan retribusi jasa umum di Kabupaten Fakfak perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antar-lembaga, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transportasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Retribusi Jasa Umum, Trayek Angkutan Umum, Mobilitas Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kondisi geografis yang kompleks, termasuk Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat. Wilayah ini terdiri dari daerah pesisir, hutan, dan perbukitan yang menantang bagi mobilitas masyarakat sehari-hari. Akses transportasi yang efisien sangat penting karena berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan akses layanan publik. Namun, Kabupaten Fakfak menghadapi kendala serius dalam sistem transportasi umum, terutama kurangnya jumlah angkutan umum yang memadai serta keterbatasan retribusi jasa yang dapat menunjang mobilitas masyarakat.

Kondisi ini memperlambat pembangunan daerah dan memperparah kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perkampungan. Keterbatasan transportasi umum memperburuk aksesibilitas, meningkatkan biaya mobilisasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun Kabupaten Fakfak memiliki potensi strategis di wilayah timur Indonesia, lemahnya implementasi kebijakan retribusi jasa umum masih menjadi hambatan utama. Pemerintah Daerah, sebagai aktor kunci, telah menetapkan kebijakan retribusi jasa umum yang mencakup pengelolaan trayek, peningkatan infrastruktur jalan, serta penyediaan moda transportasi, guna memperbaiki kondisi ini. Dampak pandemi COVID-19 memperburuk situasi transportasi umum di Fakfak. Pembatasan mobilitas menyebabkan penurunan drastis jumlah penumpang dan pendapatan para pengemudi trayek, bahkan banyak kendaraan berhenti beroperasi atau dijual. Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak mencatat penurunan signifikan dalam pendapatan dari retribusi trayek, yang sebelumnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah setempat merespon dengan kebijakan adaptif seperti penundaan pembayaran dan kelonggaran administrasi, namun belum cukup memulihkan sistem secara menyeluruh hingga akhir masa pandemi.

Dalam hal regulasi, kebijakan retribusi jasa umum diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Papua Barat mengatur standar pelayanan dan keselamatan transportasi umum.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Fakfak menyebutkan bahwa hingga tahun 2023, Fakfak memiliki penduduk sebanyak 91.453 jiwa, tersebar di 17 distrik, 7 kelurahan, dan 142 desa. Sementara itu, jumlah kendaraan pribadi tercatat sebanyak 11.495 unit, sangat tidak

sebanding dengan jumlah penduduk. Angkutan umum hanya tersedia sebanyak 495 unit dan mayoritas beroperasi di wilayah kota. Jarak yang jauh antara distrik dan pusat kota memperparah kondisi ini, karena sebagian besar fasilitas publik seperti rumah sakit dan kantor pemerintahan hanya tersedia di pusat kota.

Terkait retribusi, pada tahun 2014 Pemerintah Daerah bersama sopir angkutan umum telah menyepakati tarif resmi angkutan dengan rentang antara Rp 5.000 hingga Rp 97.000, tergantung pada jarak dan kondisi geografis. Namun, hingga beberapa tahun terakhir belum ada pembaruan tarif yang disesuaikan dengan dinamika biaya operasional dan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan masih lemahnya pembaruan kebijakan dalam sektor transportasi publik.

Berdasarkan berbagai masalah tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pengelolaan trayek mampu mendukung mobilitas masyarakat di Kabupaten Fakfak. Fokus utamanya adalah pada efisiensi sistem penarikan retribusi, pengorganisasian rute trayek, pengawasan, dan infrastruktur pendukung. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan SDM, aksesibilitas, serta teknologi yang masih minim. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih merata dan inklusif di Kabupaten Fakfak.

1.2 Gap Penelitian

Meskipun Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan kebijakan retribusi jasa umum untuk mendukung pengelolaan trayek angkutan umum, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai persoalan seperti terbatasnya jumlah angkutan umum, rute trayek yang belum merata hingga ke wilayah perkampungan, serta lemahnya pengawasan terhadap penerapan tarif resmi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Selain itu, tarif angkutan umum yang masih merujuk pada kesepakatan tahun 2014 belum disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi, biaya operasional, maupun harga bahan bakar, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan lapangan. Pandemi COVID-19 juga memperparah kondisi, dengan turunnya pendapatan retribusi dan berkurangnya jumlah kendaraan trayek aktif, namun hingga kini belum terdapat pendekatan pemulihan yang terstruktur dari pemerintah daerah. Di sisi lain, kajian ilmiah yang secara khusus mengevaluasi implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam konteks geografis yang kompleks seperti Kabupaten Fakfak masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya menganalisis efektivitas kebijakan tersebut, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung agar kebijakan ini benar-benar dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kesenjangan wilayah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas implementasi kebijakan transportasi dan retribusi jasa umum di berbagai daerah di Indonesia, meskipun dengan fokus dan konteks yang berbeda. Misalnya, Handayani et al. (2021) mengkaji implementasi kebijakan angkutan umum di DKI Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif, membahas permasalahan dan hambatan di lapangan terkait trayek angkutan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dari segi fokus pada implementasi kebijakan transportasi oleh pemerintah daerah, namun berbeda dalam metode yang digunakan dan konteks geografis serta tantangan yang dihadapi. Sitorus (2023) juga meneliti implementasi kebijakan transportasi dengan metode kualitatif dan fokus pada pengurangan kemacetan di Kota Metro Jaya, sehingga

berbeda dalam tujuan dan konteks wilayah yang dipelajari. Kusuma et al. (2016) menyoroti implementasi peraturan daerah terkait retribusi izin trayek di Kota Palembang dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada aspek administratif dan regulasi, sementara lokasi dan waktu penelitiannya berbeda dengan penelitian ini. Pohan (2019) membahas pengelolaan retribusi terminal di Kota Padang Sidempuan dengan fokus khusus pada aspek retribusi dan dampaknya terhadap transportasi umum, namun perbedaan lokasi dan cakupan kajian membuat penelitian tersebut berbeda dari fokus kajian ini yang lebih luas pada pengelolaan trayek dan mobilitas masyarakat di daerah dengan kondisi geografis yang kompleks. Selain itu, penelitian oleh Ibrahim et al. (2018) mengenai kinerja pengelolaan pajak di Kota Ternate menunjukkan pentingnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang relevan dengan aspek pengelolaan retribusi di tingkat daerah. Budiman et al. (2021) menyoroti perlunya penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi agar sesuai dengan kenaikan biaya operasional, menegaskan pentingnya kebijakan yang adaptif terhadap kondisi ekonomi. Widharta dan Kongres (2023) menekankan pentingnya penegakan aturan retribusi daerah di era digital, yang relevan dengan pengelolaan retribusi modern dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Nguyen et al. (2025) mengkaji dampak penuaan penduduk terhadap penerimaan pajak di Vietnam, memberikan perspektif makroekonomi yang relevan untuk memahami tantangan fiskal dalam pengelolaan pajak dan retribusi di berbagai negara. Secara keseluruhan, meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan banyak wawasan terkait kebijakan dan pengelolaan retribusi serta transportasi, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian khusus terkait implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pengelolaan trayek angkutan umum di Kabupaten Fakfak dengan kondisi geografis dan tantangan lokal yang unik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian yang lebih banyak fokus pada implementasi kebijakan transportasi di daerah perkotaan besar seperti Jakarta, Palembang, dan Metro Jaya, penelitian ini menitikberatkan pada konteks geografis yang kompleks dan tantangan mobilitas di wilayah perkampungan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara khusus implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pengelolaan trayek angkutan umum sebagai upaya untuk mendukung mobilitas masyarakat di daerah dengan karakteristik wilayah yang luas dan infrastruktur transportasi yang terbatas. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sering kali hanya menyoroti aspek administratif, tarif, atau pengelolaan retribusi di wilayah perkotaan atau terminal saja. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap retribusi jasa umum dan respon kebijakan adaptif pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan layanan transportasi, aspek yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa pemahaman mendalam mengenai dinamika pengelolaan retribusi trayek angkutan umum dalam konteks daerah kepulauan dan perkampungan yang memiliki tantangan geografis dan sosial-ekonomi yang khas, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan transportasi yang lebih responsif dan inklusif di daerah serupa.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pengelolaan trayek yang mendukung mobilitas masyarakat di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan

tersebut serta menggambarkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut demi meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.

II. METODE

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2017:3). Nazir (2014:26) menambahkan bahwa metode penelitian ilmiah adalah pengejaran kebenaran yang diatur oleh pertimbangan logis. Pendekatan penelitian merupakan kerangka strategi yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sujarweni, 2019:6). Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian, yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berfokus pada pengukuran dan analisis hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis dengan menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2017:14). Sementara itu, pendekatan kualitatif berorientasi pada penemuan informasi yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur statistik, serta mengutamakan pemahaman makna sosial secara mendalam melalui metode seperti wawancara dan observasi (Sujarweni, 2019:19; Creswell, 2017:10). Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretative, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel (Ridwan & Tungka, 2024). Pendekatan ini mengupayakan penelusuran informasi dari berbagai perspektif partisipan dengan menggunakan data deskriptif dan sangat sesuai serta efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yang mengupayakan penjelasan kondisi dan fenomena melalui data lapangan, serta menggunakan pendekatan deduktif untuk menyusun argumen berdasarkan data yang dikumpulkan (Suriasumantri, 1987:48).

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini berfokus pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1984), yang mempermudah pemahaman melalui dimensi dan indikator seperti komunikasi, staf, daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan dari sumber primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan diskusi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, dan sumber tertulis lainnya (Sujarweni, 2019:89). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan narasumber yang menguasai topik penelitian, dan snowball sampling untuk memperluas jumlah informan berdasarkan rekomendasi dari informan awal (Sugiyono, 2013:85).

Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu pertama menyiapkan pedoman wawancara, kedua menyiapkan alat untuk wawancara, dan ketiga mengatur waktu wawancara agar proses berjalan efektif (Simangunsong, 2017:215). Instrumen penelitian dalam studi kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang berfungsi mengarahkan fokus penelitian, menafsirkan data, serta memilih informan (Raihan, 2017). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk memperoleh informasi yang fleksibel dan mendalam dari informan, observasi langsung untuk mengamati fenomena di lapangan, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder yang bersifat permanen dan relevan (Sujarweni, 2019:7).

Analisis data mengikuti model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sujarweni, 2019:45). Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilah data penting agar lebih fokus dan mudah dianalisis, penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel atau grafik untuk memudahkan pemahaman, dan kesimpulan bersifat dinamis serta dapat diperbaiki jika ditemukan data baru. Selain itu, translasi data juga dilakukan untuk mengubah data ke dalam format yang lebih mudah

dipahami dan dianalisis. Semua tahapan ini digunakan untuk memastikan validitas data terkait implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pengelolaan trayek guna mendukung mobilitas masyarakat di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi penulis melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan dan organisasi pemerintah daerah yang berkaitan di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Dalam Penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan hasil dari penilitin dan wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Adapun beberapa informan yang penulis wawancarai adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Pengelolaan Trayek Angkutan Umum, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, masyarakat yang berada di daerah kampung, masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, dan supir angkutan umum (trayek). Dalam menganalisis implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan trayek angkutan umum, penulis menggunakan teori implementasi dari Edward III (1984). Teori ini menekankan empat indikator utama dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini menjadi kerangka dalam menilai bagaimana kebijakan retribusi jasa umum dijalankan di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

3.1 Komunikasi

Aspek komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan retribusi jasa umum, khususnya dalam pengelolaan trayek angkutan umum di Kabupaten Fakfak. Komunikasi yang baik harus terjadi antara pejabat, pelaksana, dan masyarakat agar kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, dalam penelitian ditemukan bahwa proses transmisi komunikasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak masih belum maksimal. Informasi yang disampaikan kepada pelaksana maupun masyarakat kurang lengkap dan terperinci, sehingga sosialisasi kebijakan kepada para supir angkutan umum baru akan dilakukan pada tahun 2025. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan OPD terkait juga menjadi kendala utama dalam penyampaian informasi kebijakan ini.

Selain itu, konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan juga menjadi persoalan. Meskipun Dinas Perhubungan berupaya untuk konsisten dalam penarikan retribusi, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara stabil. Kerusakan terminal dan halte menjadi hambatan fisik yang mengganggu konsistensi dalam pengelolaan trayek dan penarikan retribusi. Proses penyalarsan dan komunikasi dengan masyarakat serta supir angkutan umum pun masih dalam tahap perencanaan sehingga belum optimal.

Kejelasan kebijakan juga menjadi masalah penting. Kebijakan yang tidak tersosialisasikan secara jelas menyebabkan para supir angkutan umum dan masyarakat kurang memahami aturan terkait retribusi jasa umum. Hal ini berpengaruh pada ketidakpastian dalam pelaksanaan penarikan retribusi dan menimbulkan kesan bahwa penarikan tersebut tidak berdasarkan aturan yang jelas, bahkan dianggap cukup tinggi terutama di wilayah perkampungan. Pelaksana kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan, belum mampu menyampaikan kebijakan secara terstruktur sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak terarah dan kurang tertib.

Selain aspek komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia aparatur di Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak juga menjadi kendala yang signifikan. Jumlah aparatur yang

terbatas menghambat pelaksanaan kebijakan retribusi jasa umum, khususnya dalam pengelolaan trayek angkutan umum, sehingga implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini semakin memperjelas perlunya perbaikan komunikasi, konsistensi, kejelasan kebijakan, serta peningkatan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

3.2 Ketersediaan Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumber daya aparatur sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan retribusi jasa umum, khususnya dalam pengelolaan trayek angkutan umum di Kabupaten Fakfak. Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa jumlah aparatur yang ada saat ini masih kurang dan belum tersebar secara merata di OPD terkait, sehingga koordinasi antar instansi menjadi kurang optimal. Dengan jumlah pegawai sekitar 63 orang, Dinas Perhubungan menghadapi tantangan dalam mengelola urusan yang begitu luas. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah aparatur serta penegakan disiplin yang lebih tegas agar para pegawai dapat bekerja sesuai aturan dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana menjadi aspek penting dalam mendukung kebijakan retribusi jasa umum. Sarana seperti halte dan terminal berfungsi sebagai titik tunggu dan penghubung bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Meskipun beberapa halte telah dibangun di wilayah perkotaan maupun perkampungan, terminal besar di Kabupaten Fakfak masih dalam tahap pembangunan akibat kerusakan parah yang terjadi selama kerusuhan pada tahun 2020. Kondisi halte yang ada juga belum sepenuhnya baik karena terdapat kerusakan dan jarak antar halte yang cukup jauh, terutama di daerah perkampungan. Hal ini menyebabkan masyarakat harus menunggu di pinggir jalan atau menempuh jarak jauh untuk menggunakan angkutan umum, sehingga mobilitas masyarakat menjadi terganggu.

Data dari Dinas Perhubungan menunjukkan terdapat 14 halte yang tersebar di beberapa distrik di Kabupaten Fakfak. Namun, mengingat luas wilayah yang cukup besar, jumlah halte tersebut masih sangat terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Kondisi sarana prasarana yang belum memadai ini menjadi kendala utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi jasa umum yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan retribusi jasa umum di Kabupaten Fakfak masih menghadapi hambatan signifikan, baik dari aspek ketersediaan sumber daya aparatur maupun fasilitas pendukung. Upaya perbaikan dan penambahan kedua aspek ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan konsistensi implementasi kebijakan, serta mendukung mobilitas masyarakat secara lebih baik di masa mendatang.

3.3 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif. Menurut Edward III (1984), struktur birokrasi dapat dipahami sebagai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh instansi pelaksana kebijakan untuk memberikan pelayanan secara teratur dan sistematis. Dalam konteks Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak, SOP tersebut mencakup pengelolaan data kendaraan, seperti jenis kendaraan, tahun pembuatan, dan data lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar pemantauan dan pengawasan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Dinas Perhubungan sudah menerapkan prosedur pencatatan data kendaraan secara sistematis sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas masyarakat, khususnya bagi pengguna angkutan umum. Dengan adanya SOP ini, Dinas Perhubungan dapat mengantisipasi dan menangani masalah yang mungkin timbul terkait kendaraan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat

berjalan lebih terorganisir dan meminimalisasi hambatan yang dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat di Kabupaten Fakfak.

Secara keseluruhan, penerapan struktur birokrasi melalui SOP yang jelas menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dan mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi jasa umum agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji implementasi kebijakan transportasi dan pengelolaan retribusi di berbagai daerah di Indonesia, meskipun dengan fokus, konteks geografis, dan tantangan yang berbeda. Misalnya, studi oleh Handayani et al. (2021) mengenai kebijakan angkutan umum di DKI Jakarta menunjukkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan trayek angkutan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan dinamika perkotaan yang padat dan sistem transportasi yang sudah mapan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal fokus pada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah dan tantangan yang muncul di lapangan, namun berbeda secara signifikan dalam konteks geografis dan karakteristik wilayah, dimana Kabupaten Fakfak menghadapi kondisi wilayah yang luas dan infrastruktur yang masih terbatas.

Selain itu, Sitorus (2023) meneliti kebijakan transportasi yang lebih menitikberatkan pada pengurangan kemacetan di kawasan perkotaan Kota Metro Jaya. Fokus penelitian tersebut yang berkaitan dengan kemacetan dan mobilitas urban memberikan perspektif yang berbeda dengan studi ini yang lebih menitikberatkan pada pengelolaan trayek angkutan umum di daerah dengan kondisi geografis yang relatif terpencil dan belum optimalnya fasilitas transportasi. Kusuma et al. (2016) dan Pohan (2019) juga memberikan gambaran mengenai pengelolaan retribusi izin trayek dan terminal di wilayah perkotaan seperti Palembang dan Padang Sidempuan, dengan penekanan pada aspek administratif dan regulasi yang memiliki kemiripan pada isu-isu birokrasi dan pengawasan, tetapi dengan latar yang berbeda, baik secara demografis maupun kondisi infrastruktur.

Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Ibrahim et al. (2018) di Kota Ternate menyoroti pentingnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yang sejalan dengan temuan penelitian ini mengenai kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang menjadi kendala utama di Kabupaten Fakfak. Selain itu, kajian Budiman et al. (2021) dan Widharta & Kongres (2023) menekankan perlunya penyesuaian tarif dan penegakan aturan retribusi di era modern, termasuk digitalisasi pengelolaan retribusi, yang memberikan perspektif penting dalam mengoptimalkan kebijakan retribusi jasa umum agar lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan saat ini.

Sementara itu, studi internasional seperti yang dilakukan Nguyen et al. (2025) tentang dampak penuaan penduduk terhadap penerimaan pajak di Vietnam memberikan konteks makroekonomi yang relevan untuk memahami berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengelolaan retribusi secara lebih luas, meskipun berbeda konteks regional dan kebijakan.

Secara keseluruhan, meskipun penelitian-penelitian sebelumnya memberikan banyak wawasan dan kerangka teori yang berguna dalam mengkaji kebijakan transportasi dan retribusi, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan khususnya pada konteks implementasi kebijakan retribusi jasa umum di Kabupaten Fakfak yang memiliki tantangan unik berupa kondisi geografis yang luas, keterbatasan sarana prasarana, dan sumber daya aparatur yang terbatas. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur

tentang implementasi kebijakan di daerah dengan karakteristik khusus serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi lokal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pengelolaan trayek angkutan umum di Kabupaten Fakfak mengacu pada teori Edwards III (1984), yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, Dinas Perhubungan telah berupaya melakukan berbagai kerjasama dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, sosialisasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan retribusi jasa umum yang berlaku. Upaya sosialisasi yang direncanakan sempat terkendala karena kebijakan tersebut sedang dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Daerah agar dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Dalam aspek sumber daya, penelitian menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak masih mengalami kekurangan jumlah aparatur yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi ini diperparah oleh proses perekrutan yang kurang selektif sehingga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pengelolaan trayek angkutan umum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, dari segi disposisi, aparatur di Dinas Perhubungan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tugas dan tanggung jawab para pegawai telah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing, dan sistem insentif yang diterapkan telah mengikuti kinerja serta jabatan yang mereka emban. Hal ini menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, meskipun tantangan dari aspek lain masih perlu diperbaiki.

Terakhir, struktur birokrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak sudah disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016, yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Selain itu, struktur birokrasi ini juga didukung oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data kendaraan. Dengan demikian, struktur birokrasi yang sudah ada memberikan fondasi yang baik untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan retribusi jasa umum di Kabupaten Fakfak.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan retribusi jasa umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini lebih banyak mengandalkan data kualitatif dari wawancara dengan sejumlah informan kunci dan observasi lapangan, sehingga hasilnya mungkin kurang mewakili seluruh perspektif masyarakat atau pelaku trayek angkutan umum secara menyeluruh. Kedua, penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Fakfak, sehingga hasil dan temuan yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Selain itu, aspek teknis dan keuangan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi tidak dibahas secara mendalam, padahal hal ini juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Arah Penelitian Kedepan

Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar dilakukan studi yang lebih luas dan komprehensif dengan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak kebijakan retribusi jasa umum, termasuk dari perspektif masyarakat pengguna angkutan umum secara langsung. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi aspek teknis pengelolaan anggaran dan sistem pendataan yang lebih terintegrasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kajian perbandingan antar daerah dengan karakteristik geografis yang berbeda akan membantu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai konteks lokal. Penekanan pada inovasi teknologi informasi dalam pengelolaan retribusi juga menjadi arah yang penting untuk mendukung efektivitas dan kemudahan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak yang berada di Provinsi Papua Barat yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiman,, Rahmiyati, A. L., & Safarina, L. (2021). Analysis of health service retribution rates for primary healthcare centers in Cimahi City. *Indonesian Journal of Public Health*, 16(3), 472–482. <https://doi.org/10.20473/ijph.v16i3.2021.472-482>
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Edwards, G. C. III. (1984). *Public policy implementation* (Vol. 3). JAI Press.
- Handayani, S., Afrianti, D. A., & Suryandari, M. (2021). Implementasi kebijakan angkutan umum di DKI Jakarta. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.52920/jttl.v2i%601.30>
- Ibrahim, A. H. H., Kaunar, A., & Nurfalahadrias, I. (2018). Government performance on property tax services of rural and urban areas in Ternate City. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(9), 161–166. https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Halil-Hi-Ibrahim/publication/338684105_Government_Performance_On_Property_Tax_Services_Of_Rural_And_Urban_Areas_In_Ternate_City/links/5e2454f2a6fdcc101576786b/Government-Performance-On-Property-Tax-Services-Of-Rural-And-Urban-Areas-In-Ternate-City.pdf
- Kusuma, B. P., Lionardo, A., & Rachman, A. F. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011* (Skripsi). Universitas Sriwijaya. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/20282>
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nguyen, H.-O., Nguyen, V.-H., Vu, T.-B.-N., & Giang, T.-L. (2025). The impact of population aging on personal income tax revenue in Vietnam. *Journal of Asian and African Studies*, 60(3), 1848–1868. <https://doi.org/10.1177/00219096231200594>
- Nurdin, I., & Hartati. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

- Pohan, I. A. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Retribusi Terminal Kota Padangsidempuan* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3416>
- Raihan, M. (2017). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Prenadamedia Group.
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Sitorus, P. M. (2023). *Implementasi kebijakan transportasi publik Trans Metro Deli dalam menangani kemacetan Kota Medan* (Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area). Universitas Medan Area. <https://repository.uma.ac.id>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Pustaka Baru Press.
- Suriasumantri, J. S. (1987). *Metodologi penelitian*. PT. Gramedia.
- Widharta, R. W., & Kongres, E. (2023). Hilangnya retribusi daerah terkait layanan virtual office. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 6(2), 62–70.
<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v6i2.8656>